



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Januari 2022/Khusus - Akhir Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
UNIT KERJA : DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : TRI HARYONO
2. Jabatan : KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3. NIK : 44229

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.500.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 559 m2/170 m2 di KAB / KOTA KEBUMEN, WARISAN Rp. 2.500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 177.100.000

1. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 1994, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
2. MOTOR, YAMAHA JUPITER Z SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000
3. MOTOR, YAMAHA MIO SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 5.500.000
4. MOTOR, VESPA SUPER 4 SPEED 150 CC Tahun 1978, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
5. MOBIL, HONDA BRIO SATYA 1.2 E MT CKD Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 160.100.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 4.400.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 907.032.450

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 3.588.532.450

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 3.588.532.450

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.